FIQIH DAN POLITIK EKOLOGI: STUDI KOMPARATIF PENDEKATAN MUHAMMADIYAH DAN NAHDHATUL ULAMA TERHADAP KRISIS LINGKUNGAN

Andi Rezal Juhari¹, Fatmawati Hilal², Lomba Sultan³
Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar^{1,2,3}
andirezaljuhari586@gmail.com¹

Abstract

This research aims to explore the differing approaches of Muhammadiyah and Nahdlatul Ulama (NU), the two largest Islamic organizations in Indonesia, toward the environmental crisis. The research method employed is normative-shar'i theology with a fiqh siyasah (Islamic political jurisprudence) approach, as well as political ecology. Primary data were obtained from the fatwas of the Muhammadiyah's Majelis Tarjih and NU's Lajnah Bahtsul Masail concerning ecology. Secondary data were sourced from journals, books, and other relevant references to support the research, and analyzed qualitatively through a literature study. The results of this study show that the fundamental difference in the approaches of Muhammadiyah and NU in responding to the environmental crisis in Indonesia lies in their application of taqlid (adherence to established authority). Muhammadiyah bases its approach on the direct analysis of the Qur'an and Sunnah, whereas NU follows the qauliy (classical opinion-based) tradition. In terms of political movement, Muhammadiyah emphasizes normative regulatory aspects with a modernist tendency, while NU prioritizes the welfare of the ummah through outreach in rural areas, reflecting a more traditionalist character. The implications of these differing approaches include variations in action-based movements, public policy engagement, socio-religious discourse, education, and advocacy. The conclusion of this research suggests that the differences between Muhammadiyah and NU should be seen as a valuable asset that can complement each other in the context of multicultural life.

Keywords : *Fiqh, Ecology, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk melihat perbedaan pendekatan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama sebagai organisasi masyarakat Islam terbesar di Indonesia terhadap krisis lingkungan. Metode penelitian yang digunakan adalah teologi normatif syar'i dengan pendekatan fiqh siyasah, serta politik ekologi. Data primer diperoleh dari fatwah Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Lajnah Bahtsul Masail NU tentang ekologi, kemudian data sekunder diperoleh dari jurnal, buku dan referensi lainnya yang dapat menjadi penunjang penelitian, serta dianalisis secara kualitatif studi pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perbedaan mendasar pendekatan Muhammadiyah dan NU dalam merespon krisis lingkungan di Indonesia terletak pada sisi penerapan taqlid. Muhammadiyah yang berdasar pada analisis nash al-Qur'an dan Sunnah, sedangkan NU berdasar pada qauliy. Adapun secara gerakan politik Muhammadiyah mengedepankan aspek regulasi normatif yang terkesan modernistik, sedangkan NU mengedepankan kemaslahatan ummat melalui penyebaran di pelosok yang terkesan tradisionalistik. Implikasi perbedaan pendekatan ini terdiri dari gerakan aksi, kebijakan publik, swacana sosial keagamaan, dan pendidikan serta advokasi. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa perbedaan yang terdapat di antara Muhammadiyah dan NU seyogyanya merupakan sebuah khazanah yang dapat menutupi setiap kekurangan di dalam kehidupan multikultural.

Kata Kunci : Fiqih, Ekologi, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama.

PENDAHULUAN

Dinamika lingkungan merupakan problem yang sangat krusial di era dewasa ini. Ancaman ini tidak lagi menjadi sebuah isu belaka, melainkan sebagai fakta konkret yang terjadi di Indonesia. Penanganan terhadap kasus *aquo* tidak hanya digencarkan oleh pemerintah, tetapi juga melibatkan berbagai kalangan, terkhusus kalangan organisasi massa (ormas) Islam seperti Nahdhatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Keterlibatan kedua ormas tersebut dianggap sangat penting (Huda 2023), tidak hanya karena terobosan pemikirannya yang sangat membumi di masyarakat dan anggotanya yang banyak, melainkan karena kehadirannya dalam menanggapi isu sosial yang sangat pesat (Fatmawati Hilal & Palantei, 2021). Salah satu gerakan kedua ormas ini dalam merespon isu aktual krisis lingkungan adalah adanya terbososan pemikiran dan gagasan proyek yang mendukung sebagai langka solutif terhadap permasalahan ekologi di Indonesia, seperti gerakan advokasi, pelestarian lingkungan berbasis pesantren (ekopesantren) (Ahmad Sholehuddin Suryanullah 2025). Gerakan tersebut merupakan bukti konkret bahwa kehadiran NU dan Muhammadiyah memberikan bukti nyata dalam masyarakat dan negara.

Terdapat berbagai penelitian sebelumnya yang mengkaji status *quo* pada terma merespon krisis lingkungan di Indonesia. Ahmad Sholehuddin Suryanullah (2025) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama merupakan ormas yang aktif mengampanyekan kesadaran lingkungan melalui penerapan pendidikan berbasis integrasi ekologi dan teologi. Konsep teori yang lahirpun terdapat beberapa macam seperti ekoreligiusitas, ekoteologi, ekosufisme, ekosentrisme Islam, eko-pesantren dan sebagainya. Demikian halnya hasil penelitian Muhammad Wahidin (2024) yang berfokus pada kajian kontestasi politik ekologi Muhammadiyah dengan pemerintah dalam merespon diskursus antara ekologi dan industrisasi. Menurut Wahidin, bahwa terjadinya perbedaan pandangan politik hukum antara Muhammadiyah dan Pemerintah disebabkan karena konteks pendekatan yang berbeda. Muhammadiyah menekankan pada pandangan teoantroposentris, sedangkan pemerintah mengedepankan konsep industrisasi pertumbuhan ekonomi. Kemudian Muhammad Wahdini (2025) dalam penelitiannya juga mengungkapkan bahwa Muhammadiyah dalam merespon diskursus *aquo* mengalami pergeseran konsep tarjih yang melahirkan gagasan fikih responsif seperti fikih air sebagai dasar pemikiran terkabulnya permohonan *judicial review* UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (SDA), fikih agraria, dan fikih kebencanaan.

Ketiga penelitian di atas saling memiliki keselarasan dalam menyoroti isu krisis dan politik lingkungan. Permasalahan utama yang terdapat pada ketiga penelitian di atas terlihat dalam konteks dinamika politik ekologi yang bermuara pada lahirnya kebijakan pemerintah. NU dan Muhammadiyah juga saling mengampanyekan melalui bidang pendidikan maupun advokasi hukum, namun yang menjadi problem adalah penelitian tersebut tidak mengkaji secara mendalam konsep pendekatan yang digunakan oleh Muhammadiyah yang mengedepankan teoposentrisme terkesan kontradiktif dengan pemerintah. Sedangkan jika merujuk pada respon NU yang cenderung lebih

condong fleksibel terhadap kebijakan pemerintah. Secara historis, perbedaan pergerakan kedua ormas besar ini sudah terjadi sejak pembentukannya seperti orientasi pendirian dan arah gerakan politiknya (Hawari, Suwaryo, & Kartini, 2023). Perbedaan inilah yang kemudian menjadi corak perjalanan perkembangan Muhammadiyah dan NU yang tentunya memberikan warna dalam dinamika politik dan isu kenegaraan di Indonesia.

Perbedaan kecenderungan antara NU dan Muhammadiyah di samping terdapatnya persamaan dari segi aksi dalam merespon politik ekologi di Indonesia terletak pada konsep istinbath hukumnya (Nursyahbani, Husen, Nurhamdani, & Kholik, 2025). Proses istinbath hukum Muhammadiyah dikenal dengan pendekatannya yang reformis dalam Islam dan menentang segala praktik yang bertentangan dari koridor syariah, sedangkan NU dikenal dengan pendekatannya yang lebih inklusif dan toleran terhadap isu aktual (Febriansyah & Nasuki, 2024). Oleh karena itu, kajian studi komperatif pendekatan antara Muhammadiyah dan NU dalam merespon krisis lingkungan di Indonesia sangat penting. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perbedaan pendekatan yang digunakan oleh Muhammadiyah dan NU dalam istinbat hukum dan gerakan politik ekologi di Indonesia. Lebih lanjut, penelitian ini juga akan mengkaji implikasi perbedaan pendekatan Muhammadiyah dan NU dalam merespon krisis lingkungan di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Desain penelitian yang digunakan adalah teologi normatif syar'i dengan pendekatan fiqh siyasah dan politik ekologi sebagai teori mendasar dalam meninjau konsep pendekatan istinbath hukum Muhammadiyah dan NU terhadap krisis ekologi di Indonesia. Data penelitian bersumber dari data primer berupa fatwah hasil Bahtsul Masail NU tentang ekologi, fatwah majelis tarjih dan tajdid Muhammadiyah tentang pelestarian fungsi lingkungan hidup, literatur yang membahas fiqh siyasah dan politik ekologi. Kemudian data sekunder yang diperoleh dari literatur berupa artikel ilmiah, buku dan dokumen pendukung lainnya tentang krisis lingkungan maupun politik lingkungan. Data tersebut dikumpulkan melalui studi pustaka dengan teknik pengumpulan data yang berfokus pada kajian analisis fatwah, teori dan pendapat ahli dari tokoh Muhammadiyah dan NU. Adapun teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif untuk memberikan gambaran perbedaan pendekatan antara Muhammadiyah dan NU terhadap krisis lingkungan.

LANDASAN TEORETIS

A. Krisis Lingkungan

Menurut Effine Lourrin (2022), krisis lingkungan adalah proses terjadinya penurunan kualitas atau deteriorasi lingkungan. Penurunan kualitas ini diakibatkan oleh aktivitas manusia sebagai bagian dari alam yang tidak dapat terpisahkan. Hubungan kedua entitas ini merupakan hubungan timbal balik, sebagaimana doktrin kausalitas yang diamini oleh pemikir Islam seperti al-Farabi, Ibn Sina dan Khawajah Nasiruddin al-Thusi (Qurrotul'ain & Soleh, 2024). Penyebab krisis lingkungan dapat digolongkan

menjadi dua faktor, yaitu: *pertama*, bencana alam manusia yaitu kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh manusia. Faktor ini berdampak pada bencana alam yang sangat fatal baik secara teritorial bahkan skala global. *Kedua*, bencana alamiah yaitu faktor yang disebabkan oleh aktivitas lingkungan sendiri dan tidak dapat dikuasai oleh manusia, seperti gempa, erupsi gunung merapi dan tsunami. Meskipun begitu, namun tidak dapat dipungkiri bahwa manusia seringkali minim tindakan antisipatif dalam menghadapinya (Widodo, 2021). Maka dari itu, kunci utama dalam terma ini tidak lain merupakan hubungan timbal balik manusia dalam menjaga keseimbangan ekosistem.

Pada terma dimensi pandangan manusia terhadap alam terbagi menjadi tiga yang diawali oleh pandangan ekosentris. Pandangan ini ditandai dengan pemahaman bahwa manusia dikelilingi oleh kekuatan alam. Pandangan ini menganggap bahwa terjadinya bencana alam merupakan bentuk kemarahan alam yang disebabkan oleh perbuatan manusia. Dimensi kedua yaitu ontologis atau antroposentrisme, dimensi ini menanamkan pemikirannya pada anggapan bahwa manusia memiliki kekuasaan untuk mengendalikan alam. Pandangan antroposentris menjadikan manusia sebagai bagian yang berada di luar hubungan alam dengan cara merasionalisasikan proses alam dan menyajikan kausalitas pengetahuan. Seperti terjadinya banjir bukan karena kemarahan alam, melainkan akibat aktivitas pembuangan sampah di aliran sungai. Tahap terakhir yaitu dimensi fungsional yang condong berpacu pada konteks relasi perbuatan, teori, keputusan politis, peraturan, pekerjaan dan praktik (Ratnasari & Dwisusanto, 2024). Dimensi ini memandang hubungan antara alam dan manusia pada fungsi atau peran antara satu sama lain.

B. Fiqih Siyasah

Fiqih siyasah berasal dari kata “fiqih” dan “siyasah”. Secara etimologi, kata “fiqih” merupakan bentuk mashdar dari kata *fqiha-yafqahu-fiqhan* yang bermakna paham. Secara istilah, fiqih adalah ilmu yang menjelaskan hukum-hukum syara’ amaliah yang digali dari dalil-dalil secara terperinci (Al-Zuhaili, 2001). Sedangkan kata “siyasah” secara etimologi berasal dari kata *sasa-yasuusu-siyasatan* berarti mengatur, mengurus dan memerintah (Manzur, 1968). Kata “siyasah” juga diartikan sebagai pemerintahan atau politik (Khallaf, 1977). Terma fiqih siyasah juga sering disebut sebagai siyasah syar’iyah, yaitu memperbaiki problematika rakyat dan mengaturnya dengan cara memerintah berdasarkan sebab ketaatan terhadap pemerintah (Al-Bujairimi, n.d.). Menurut Al-Awqaf Kuwait (n.d.), siyasah syar’iyah adalah memperbaiki kehidupan manusia dengan menunjukkan pada jalan yang dapat menyelamatkannya saat sekarang dan akan datang serta turut mengatur permasalahan mereka.

Objek kajian fiqih siyasah menurut Abdul Wahhab Khallaf (1977) adalah membentuk peraturan perundang-undangan untuk mengurus negara berdasarkan ajaran Islam. Sedangkan Hasbi al-Shiddiqy (n.d.) berpandangan, bahwa objek kajian fiqih siyasah adalah pekerjaan mukallaf dan segala urusan peraturan yang tidak diperoleh dari dalil khusus dan tidak bertentangan dengan *syariah amma*. Berbeda dengan Ibnu

Taimiyah (n.d.), menurutnya objek kajian fiqh siyasah terletak pada terma kekuasaan yang diperoleh dari amanah untuk menetapkan hukum yang adil. Secara garis besar, objek kajian fiqh siyasah berada pada terma perundang-undangan negara, keorganisasian atau kelembagaan, dan hubungan antara penguasa dan rakyat yang berkaitan dengan hak dan kewajiban masing-masing. Meskipun secara teknis dari hasil interpretasi para fuqaha tentang objek kajian fiqh siyasah, namun pada hakikatnya bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan ummat.

Prinsip-prinsip fiqh siyasah dalam al-Qur'an sebanyak 13 dan 5 dari hadis. Sedangkan Suyuthi Pulungan membaginya menjadi 16 prinsip dari al-Qur'an dan 11 dari hadis. Meskipun terdapat berbagai pandangan yang berbeda dikalangan pakar, namun secara substansi terdiri dari; 1) prinsip kedaulatan; 2) prinsip keadilan; 3) prinsip musyawarah; 4) prinsip persamaan; 5) prinsip hak dan kewajiban negara dan masyarakat; dan 6) prinsip *amar ma'ruf nahi munkar* (Fikriana & Rezki, 2024). Oleh karena itu, pembahasan dalam kajian fiqh siyasah sangat substansial dalam merespon isu-isu aktual yang terjadi di masyarakat, terkhususnya berkaitan kebijakan dan umat.

C. Politik Ekologi

Politik ekologi (lingkungan) adalah pendekatan yang menggabungkan antara problem lingkungan dengan politik ekonomi sebagai representasi dinamika antara relasi manusia dan lingkungan, dan antara kelompok maupun individual dalam skala lokal hingga transnasional (Hidayat, 2011). Definisi ini selaras dengan maksud politik menurut filsuf dan pakar, seperti pandangan Fadjar Tri Sakti (2020) yang mendefinisikan politik sebagai ilmu yang mempelajari tentang hubungan antara kekuasaan, antara warga negara, negara dan warga negara, maupun hubungan antar negara. Oleh karena itu, politik ekologi dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mengkaji secara khusus permasalahan lingkungan melalui relasi antar negara, warga negara dengan negara, maupun antar warga negara. Melalui politik ekologi ini, relasi antara aspek tersebut bertujuan untuk melahirkan kebijakan yang menyeimbangkan kebutuhan pertumbuhan perekonomian dan keseimbangan ekosistem.

Kajian politik ekologi dewasa sangat substansial, mengingat kondisi ekologis secara nasional maupun global menjadi isu perbincangan hangat. Kebutuhan pertumbuhan perekonomian yang kian meningkat, berimplikasi luas kawasan hutan yang semakin menipis. Pentingnya tinjauan politik ekologi dalam melihat problematika perkembangan saat ini karena seimbangannya ekosistem dan kebutuhan perekonomian masyarakat didasarkan pada pandangan manusia terhadap lingkungan (Absoellah, 2020). Oleh sebab itu, dalam perumusan penanganan problematika lingkungan sangat sarat kaitannya dengan konteks politik, baik dalam ranah bernegara maupun dalam keorganisasian. Keterlibatan masyarakat seyogyanya sebagai alat kontrol sosial agar tidak terjadi tindakan eksploitasi dan perusakan lingkungan. Lingkungan harus dikelola berdasarkan asas keseimbangan dan berkelanjutan, asas ini harus terimplementasi dalam berbagai kebijakan dan peran masyarakat, baik secara individual maupun kelompok.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama

1. Muhammadiyah

Muhammadiyah merupakan organisasi pergerakan umat Islam yang didirikan pada tahun 18 November 1912 M/8 Zulhijjah 1330 H di Yogyakarta oleh seorang cendekiawan pembaharu bernama Kyai Haji Ahmad Dahlan yang sebelumnya bernama Muhammad Darwisy. Ahmad Dahlan merupakan anak ke-4 dari pasangan Kyai Haji Abu Bakar bin Kyai Haji Sulaiman dan Siti Aminah yang juga memiliki sanad dari Maulana Malik Ibrahim sebagai keturunan ke-12 (Peacock, 2016). Berdirinya Muhammadiyah berasal dari faktor keteguhan Ahmad Dahlan, termasuk buah pemikirannya setelah berguru pada ulama terkemuka nusantara seperti Syaikh Ahmad Khatib Minangkabau, Kyai Nawawi al-Bantani, Kyai Mas Abdullah Surabaya dan Kyai Fakih Maskumambang. Selain itu, Ahmad Dahlan juga menjalin hubungan interaksi dengan berbagai pemikir pembaharu Islam seperti Ibnu Taimiyah, Muhammad bin Abdul Wahhab, Jamaluddin al-Afghani, Rasyid Ridha dan Muhammad Abduh (Nashir, 2010).

Berkat interaksi hubungan Ahmad Dahlan dengan pemikir-pemikir pembaharu Islam tersebut, pemikirannya seringkali dikatikan sebagai perpanjangan ide dari kelompok pergerakan Muhammad Abduh di Mesir. Anggapan tersebut karena pemikiran Muhammadiyah dan kelompok pergerakan Muhammad Abduh memiliki kesamaan dari segi ideologis, meskipun jika ditinjau evidensi latar belakang kedua tokoh besar ini terdapat perbedaan. Muhammad Abduh yang berfokus pada pengembangan etika transformatif, sedangkan Ahmad Dahlan pada terma nilai amaliah (Arifin, 2016). Meskipun keduanya memiliki orientasi pengembangan yang berbeda, namun kedua tokoh tersebut memiliki orientasi pokok yaitu melahirkan pembaharuan Islam yang terbebas dari tindakan khurafat, syirik dan perbuatan yang bertentang dengan syariat, oleh Haedar Nashir disebut sebagai teologi pembebasan (*theology of liberation*).

Pada perkembangannya, Muhammadiyah mengalami berbagai tantang terkhusus di bawah pemerintahan kolonial Belanda (1912-1942) seperti paternalisme kejawen, *zending*, alienasi *missi*, birokratisme kolonial. Tantangan tersebut justru menjadi alasan bangkitnya *internal action* di lingkungan Kesultanan Yogyakarta seiring berkembangnya organisasi besar masa itu seperti Boedi Oetomo dan Sjarikat Islam (Arifin, 2016). Berkembangnya Muhammadiyah sebagai ormas Islam berawal dari keterlibatan pengusaha di dalamnya dan ketertarikan masyarakat pada kajian Ahmad Dahlan setelah ditunjuk memberikan pengajian keagamaan di Kongres Boedi Oetomo tahun 1917. Muhammadiyah kemudian melejit pada taraf nasional pada tahun 1921 bersamaan dengan melemahnya pengaruh Boedi Oetomo dan Sjarikat Islam hingga didirikannya sekolah-sekolah Muhammadiyah di Jawa dan luar Jawa (Arifin, 2016). Corak politik perkembangan Muhammadiyah sebagai ormas Islam baru saat itu melejit tidak hanya karena konsep gagasan, tetapi juga kondisi dinamika politik yang juga ikut mewarnai perkembangannya.

Pada tahun 1942, pimpinan PP Muhammadiyah mendapatkan bimbingan politik tingkat nasional oleh Jepang di bawah kepemimpinan Mas Mansur dan bergabung kedalam kelompok “empat serangkai” yaitu Soekarno, Hatta dan Ki Hajar Dewantara. Setelah masa kemerdekaan, Muhammadiyah bergabung dengan Partai Masyumi untuk memperjuangkan Indonesia menjadi negara Islam. Namun gerakan ini akhirnya dibekukan oleh Soekarno pada tahun 1960 bersamaan dicetuskannya sistem demokrasi terpimpin. Meskipun Muhammadiyah pada saat itu mengalami kekhawatiran akan ancaman pembubaran oleh pemerintah, namun pasca digulingkannya Soekarno dan dilakukannya pemberantasan PKI, Soeharto memanfaatkan ormas Islam termasuk Muhammadiyah yang juga memiliki dendam terhadap PKI untuk melakukan pembersihan (Peacock, 2016). Keterlibatan inilah kemudian menjadikan Muhammadiyah sebagai organisasi yang turut terlibat dalam corak politik pemerintahan di Indonesia.

2. Nahdatul Ulama

Nahdatul ulama merupakan organisasi massa Islam yang sejak sebelum lahirnya telah berasal dari kelompok aktivis sosial keagamaan (Anam, 2010). Berdirinya Nahdatul Ulama dilatarbelakangi oleh berbagai problem sosial politik atas gejala politik Islam pra-kemerdekaan di Indonesia. Proses ini juga sangat berkaitan dengan peran Syarikat Islam dan Muhammadiyah yang saat itu telah melebarkan sayap politiknya pada tahun 1920-an. Namun karena syarikat Islam mendapatkan kecaman secabagai ancaman bagi para pemimpin tradisional umat, yaitu Kiai. Sehingga Martin Van Bruinessen (1994) menyebutkan bahwa terbentuknya NU merupakan reaksi defensif terhadap aktifitas kelompok reformis, Muhammadiyah dan kelompok modernis moderat yang bergerak di bidang politik.

Lebih lanjut ketika merujuk pada pandangan M. Ali Haidar (1994) yang menarasikan bahwa terbentuknya NU dilatarbelakangi oleh beberapa hal, baik secara langsung maupun tidak langsung. Seperti gerakan pembaharuan di Turki oleh Musthafa Kemal al-Tathurk yang disebut gerakan nasionalisme dan berhasil meruntuhkan Khilafah Utsmaniyah tahun 1924, gagasan ini kemudian didukung oleh Mustafa Abd Raziq. Selain itu, gerakan pembaharuan di Mesir oleh Jamaluddin al-Afghani yang disebut Pan-Islamisme untuk mempersatukan Islam seluruh dunia. Lahirnya pemikir reformis dalam pembaharu Islam di berbagai negara menjadi ciri khas gagasan kebaharuan dalam Islam.

Sebelum adanya Nahdhatul Ulama juga diawali dengan pendirian organisasi pendidikan dan da'wah yang disebut Nahdhat al-Wathan tahun 1914 dan Tashwir al-Afkar tahun 1918 yang kelak membangun sekolah di berbagai wilayah di pulau Jawa. Kedua organisasi ini didirikan oleh KH. Abdul Wahab Chasbullah dan Mas Mansur (Haidar, 1994). Pada tahun 1922 dilaksanakan Kongres al-Islam di Cirebon yang menjadi panggung sejarah perdebatan keras antara kelompok tradisional yang diwakili oleh Abdul Wahab dengan kaum reformis yang dipimpin oleh Achmad Sorkati pendiri al-Irsyad dan Achmad Dahlan pendiri Muhammadiyah. Menurut

Deliar Noer (1980), perdebatan keras itu menimbulkan tuduhan-tuduhan kafir dan syirik.

Secara pemikiran, Nahdatul Ulama lahir dari gagasan kaum tradisional terkhususnya ketika terjadi polemik penyerangan Kaum Wahabi di Makkah dan penghapusan khilafah oleh Turki atas gagasan Mustafa Kemal al-Tathurk. Bagi kaum tradisional di Indonesia, hal yang paling utama adalah mempertahankan bentuk-bentuk ibadah yang mereka praktikkan, yang kerap dianggap sebagai bid'ah oleh kaum Wahabi yang bersifat puritan. Praktik-praktik tersebut mencakup pembangunan makam, ziarah kubur, pembacaan doa seperti Dalā'il al-Khayrāt, serta keyakinan terhadap keberadaan wali (Noer, 1980).

Menjelang Kongres al-Islam di Bandung pada tahun 1926, organisasi pembaharu sempat mengadakan pertemuan di Cianjur dan memutuskan untuk mengirim dua orang utusan ke Makkah. Namun, dalam kongres tersebut yang berlangsung pada Februari 1926, usulan dari Abdul Wahab agar tradisi-tradisi keagamaan yang dianut kaum tradisional dibawa dan disuarakan oleh delegasi Indonesia ditolak oleh kalangan reformis (Haidar, 1994).

Penolakan inilah yang kemudian mendorong kelompok tradisional untuk mengambil langkah terpisah dalam memperjuangkan aspirasi mereka kepada Raja Ibn Sa'ud, dengan harapan agar tradisi keagamaan di Makkah tetap dipertahankan. Untuk menunjang misi ini, dibentuklah Komite Hijaz, yang pada tanggal 31 Januari 1926 (16 Rajab 1344 H) mengadakan rapat dan menyepakati pembentukan sebuah organisasi Islam bernama Nahdatul Ulama (Kebangkitan Para Ulama) yang berhaluan *Ahlussunnah wal Jama'ah* (Zuhri & Hasbullah, 1972).

B. Perbedaan Pendekatan Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama dalam Istinbath Hukum dan Gerakan Politik Ekologi di Indonesia

Permasalahan ekologi di Indonesia telah diamini secara bersama sebagai problematika yang sangat penting dalam menghadapi tantangan kebutuhan kedepannya. Terjadinya kesenjangan antara kebutuhan perekonomian dan keseimbangan ekosistem akhirnya menuai kontroversial di kalangan masyarakat dan elit politik. Di saat situasi kegentingan ini, Nahdatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah hadir dengan gagasan yang terkesan berbeda sebelumnya. Secara metode istinbath hukum yang digunakan oleh kedua ormas besar ini jika ditinjau dari segi pangkalnya, berada pada perbedaan dalam memahami prinsip-prinsip istinbath hukum. perbedaan ini kemudian berhilir pada perbedaan ritual *amaliyah yaumiyyah*. Akibat dari tidak dipahaminya secara bijak dan benar terkait pemetaan kedua simpatisan ormas ini sehingga terjadi friksi tersebut (Fananie & Sarbadila, 2000).

Secara definisi, istilah istinbath merupakan upaya untuk mengeluarkan atau mengambil makna dari nash yang ada sebelumnya (Romli, 1999). Oleh metode ini kemudian terdapat perbedaan pengimplementasian, istilah ini kemudian lebih dikenal dalam Nahdatul Ulama, sedangkan bagi Muhammadiyah lebih familiar dengan istilah ijtihad. Kemudian perbedaan yang paling mendasar juga di antara kedua ormas ini dari

segi pendekatan dalam istinbath hukum adalah dari segi orientasi pendekatan. Nahdatul ulama sebagaimana yang telah diuraikan dari sisi historis pembentukan berbasis pada tradisionalitas dan bersifat fleksibel dalam merespon konteks sosial budaya yang hidup di masyarakat. Sedangkan Muhammadiyah berbasis pada pemaknaan dan orientasi secara reformis. Sehingga kedua ormas ini sering terjadi perbedaan pandangan dalam merespon berbagai polemik kebijakan pemerintahan di Indonesia.

Lebih lanjut, pembahasan mengenai diskursus krisis ekologi di Indonesia, NU dan Muhammadiyah memiliki dari segi respon dalam setiap forum-forum besarnya. Seperti Muhammadiyah yang telah mengangkat isu ekologi ini dalam berbagai kegiatan seperti pada saat awal berdirinya dibentuk komite Penoloeng Kesengsaraan Oemoem (PKO) tahun 1918 yang digagas oleh Haji Soedja' dan merupakan hasil tajdid. Kemudian isu ekologi juga telah menjadi perbincangan hangat di kalangan Muhammadiyah khususnya pada setiap kegiatan Muktamar sejak tahun 1971 yaitu Muktamar ke-38 hingga Muktamar 2022 (Sandiah, 2023). Bahkan sebagai bentuk keseriusan Muhammadiyah dalam menghadapi isu ini, dibentuk program advokasi yang disebut jihad advokasi seperti pengajuan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi tentang Sumber Daya Miner dan Air. Pengajuan tersebut merupakan hasil ijtihad Muhammadiyah yang berbasis pada pandangan bahwa alam merupakan tanggungjawab manusia untuk mengelolanya sebagai bagian dari tugas seorang khalifah di muka bumi.

Adapun metode majlis tarjih Muhammadiyah dalam menentukan suatu kompleksitas permasalahan umat menjadikan al-Qur'an dan Hadis sebagai patokan utama dengan pendekatan sains untuk memahami kehidupan duniawi. Metode ijtihad yang digunakan oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah terdiri dari *ijtihad bayani* ketika terdapat nash yang mustawarak atau *mujmal*. Kemudian *jtihad qiyasi* yaitu mengkontekstualisasikan hukum yang telah ada terhadap permasalahan baru yang tidak memiliki nash tetapi memiliki kesamaan *illat*. Terakhir yaitu *ijtihad istislahi* yaitu ijtihad terhadap permasalahan yang tidak memiliki nash secara khusus maupun secara kemiripan, dan penyelesaiannya berdasar pad *illat* kemaslahatan (Djamil, 1995). Metode istinbath hukum tersebut dapat diartikan sebagai metode yang berdasar pada nash yang terdiri dari nash qath'i yang tidak dapat diperdebatkan, masalah yang memiliki nash namun masih diperselisihkan sehingga ditempuh cara *tawaqquf*, *tarjih* (pengambilan dalil yang lebih kuat diantara dalil yang bertentangan melalui metode *jarh* sebelum *ta'dil*, riwayat *tadlis*, pendapat sahabat tentang *musytarak*, dan mengutamakan penafsiran arti kata sahabat secara tersurat dibandingkan tersirat), *jam'u* (penggabungan dalil yang bertentangan), dan proses istinbath berdasar pada prinsip-prinsip ajaran Islam ketika terdapat masalah yang tidak memiliki nash dan dibutuhkan oleh masyarakat (P. P. Muhammadiyah, n.d.).

Demikian halnya Nahdatul Ulama yang tidak terlalu berbeda jauh dengan Muhammadiyah. Nahdatul Ulama dalam menetapkan suatu hukum senantiasa berdasar pada 3 prosedur baku metode istinbath sebagaimana yang diimplementasikan dalam Lajnah Bahtsul Masail, yaitu; sikap bermadhab yang berimplikasi pada pengikraran bermadhab dan penguatan validitas keilmuan melalui sanad yang bersambung kepada

Rasulullah saw. Kemudian konsep *kutub mu'tabarah* yaitu konsekuensi logis dan pemikiran madzhab yang berdasar pada berdasarnya pemikiran dalam kitab-kitab madzhab imam *ahlu sunnah wal jama'ah*. Menurut Ahmad Zahro (2004) terdapat tiga prosedur baku dalam metode penetapan sebuah hukum di lajnah, yaitu *qauly* yang berarti pendapat, konsep ini dapat terlihat dalam setiap keputusan *lajnah* yang selalu mencantumkan pandangan ulama. Selanjutnya *ilhaqy* yang berarti analogi. Konsepsi analogis ini berbeda dengan analogi dalam artian *qiyas* dalil al-Qur'an dan Hadis, tetapi menyeberangkan pandangan ulama terhadap permasalahan yang ada. Terakhir adalah *manhajiy* yaitu metodologis yaitu pengambilan *illah* dalam mewujudkan kemaslahatan pada hukum tersebut. Selain itu, konsepsi *lajnah* dalam menerapkan hukum juga berdasar pada sikap ideal bermadzhab yang dikenal dengan istilah *tawasuth i'tidal, tasamuh, tawazun, dan amar ma'ruf nahi munkar*.

Berdasarkan karakteristik istinbath hukum sebelumnya antara Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama dapat dipahami, bahwa perbedaan mendasarnya hanya dari segi metode dan basis proporsionalitas dalam penerapan istinbath hukum. Muhammadiyah menekankan pada al-Qur'an dan Sunnah sebagai dalil yang utama, serta penerapan konsep *qiyas* terhadap dalil tersebut terhadap permasalahan yang ada di masyarakat. Serta pengimplementasian istinbath hukum berbasis pada ajaran prinsip dasar Islam. Sedangkan Nahdatul Ulama menekankan pada taklid yang berhaluan pada imam empat madzhab serta mengqiyaskan suatu masalah dengan pandangan ulama (*qauly*). Atas dasar itu, secara analogi dapat terlihat pada respon Muhammadiyah dan NU terhadap polemik kebutuhan ekonomi/industrialisasi dan keseimbangan ekologi melalui aktivitas pertambangan. Kedua ormas ini diberikan kebolehan untuk mengelola tambang, meskipun keduanya memiliki kesamaan dari segi pendekatan kemaslahatan, tetapi berbeda dari segi pandangan (Yahya, 2024). Muhammadiyah merespon tawaran aktivitas tambang ini dengan kehati-hatian dan melakukan penolakan dengan dasar bertentangan dengan syariat. Namun akhirnya diterima dengan tujuan dakwah ekonomi. Berbeda dengan NU yang merespon izin pertambangan tersebut secara langsung sebagai wadah untuk mendistribusikan manfaat kepada masyarakat lebih luas melalui badan usaha yang dibentuknya. Penolakan Muhammadiyah menekankan pada segi regulasi yang menurutnya Perpres 70 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Lahan Penataan Investasi bertentangan dengan UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

C. Implikasi Perbedaan Pendekatan Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama dalam Merespon Krisis Lingkungan di Indonesia

Perbedaan pendekatan antara Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) dalam merespon krisis lingkungan di Indonesia memberikan kontribusi yang beragam terhadap kesadaran dan aksi umat Islam dalam menjaga kelestarian lingkungan. Kedua organisasi besar ini memiliki latar belakang metodologi keislaman dan strategi dakwah yang berbeda, sehingga menghasilkan implikasi yang khas dalam tataran wacana, hingga kebijakan. Adapun implikasi responsitas Muhammadiyah dan NU terhadap krisis

lingkungan di Indonesia berdasarkan perbedaan pendekatan dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Implikasi terhadap Wacana Keagamaan

Perbedaan metodologi pemikiran antara Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) memberikan dampak signifikan dalam membentuk wacana keagamaan seputar isu-isu lingkungan hidup di Indonesia. Pendekatan Muhammadiyah yang rasionalistik dan tekstual berbeda dengan pendekatan tradisionalistik-kultural NU, sehingga menghasilkan corak diskursus keagamaan yang beragam namun saling melengkapi. Muhammadiyah cenderung mengedepankan pendekatan rasional dan tekstual dalam memahami teks-teks keagamaan, khususnya ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis yang berkaitan dengan lingkungan (M. T. dan T. P. Muhammadiyah, 2018). Pendekatan ini menempatkan dalil-dalil naqli dalam kerangka berpikir ilmiah yang sistematis. Dalam konteks ini, ajaran Islam dipahami sebagai sistem nilai yang mendukung ilmu pengetahuan dan kemajuan peradaban, termasuk dalam aspek pelestarian lingkungan. Hal ini tampak jelas dalam produk pemikiran seperti Fiqih Lingkungan yang diterbitkan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah.

Kesadaran ekologis dalam perspektif Muhammadiyah berimplikasi pada penguatan argumentasi normatif berbasis etika Islam dan logika ekologis. Hal ini bertujuan agar isu lingkungan tidak hanya menjadi urusan aktivisme, tetapi juga bagian dari ajaran agama yang memiliki landasan tekstual dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Muhammadiyah membangun narasi bahwa pelestarian lingkungan adalah bagian dari kewajiban keimanan, sebagai bentuk amanah dari Allah untuk menjadi khalifah di bumi (*khalifat fil-ardh*) (Dzuhayatin, 2019). Dalam wacana ini, manusia tidak boleh merusak alam karena akan merusak keseimbangan ciptaan Tuhan (*fasād fī al-ardh*).

Di sisi lain, NU lebih menekankan pendekatan tradisional-kultural dan spiritual dalam membentuk kesadaran ekologis. Dalam banyak kesempatan, NU menempatkan isu lingkungan dalam konteks kearifan lokal, spiritualitas Islam Nusantara, dan tradisi keagamaan masyarakat. Wacana ini tidak hanya dibangun melalui teks, tetapi juga melalui pengalaman hidup dan praktik sosial yang tumbuh dari akar budaya pesantren dan masyarakat desa. Salah satu contoh nyata adalah forum Bahtsul Masail, yang menjadi arena diskusi dan istinbath hukum berbasis realitas lokal (Ghazali, 2002). Di forum ini, para kiai membahas isu lingkungan secara kontekstual dan menghasilkan fatwa-fatwa yang relevan dengan kehidupan masyarakat sekitar.

Selain itu, melalui *Fiqh Ecologi* yang disusun Lembaga Bahtsul Masail PBNU, NU mengintegrasikan nilai-nilai maqashid al-syari'ah dalam pemaknaan terhadap krisis ekologis. Dalam kerangka ini, pelestarian lingkungan dianggap sebagai bagian dari penjagaan terhadap lima tujuan utama syariat (*hifzh al-din, al-nafs, al-'aql, al-nasl, dan al-mal*), serta perluasan terhadap penjagaan alam (*hifzh al-bi'ah*) sebagai unsur penunjang kemaslahatan hidup manusia (PBNU, 2019).

Pendekatan ini tidak hanya legal-formal, tetapi juga mencakup dimensi spiritualitas dan kesadaran kolektif sebagai makhluk yang lemah di hadapan alam dan Tuhan.

Implikasi wacana keagamaan NU mengenai lingkungan menjadi lebih membumi, inklusif, dan komunikatif dengan masyarakat awam. Pendekatan kultural ini memudahkan internalisasi nilai-nilai ekologis dalam praktik keseharian umat, karena disampaikan melalui simbol-simbol religius yang akrab, seperti tahlilan, pengajian, dan tradisi lokal lainnya. Kiai, sebagai tokoh sentral dalam NU, berperan besar dalam mentransformasikan isu lingkungan menjadi bagian dari pengamalan ajaran Islam yang holistik dan kontekstual (Suaedy, 2015). Maka dari itu, perbedaan pendekatan ini menghasilkan dua wajah wacana keagamaan yang saling melengkapi: Muhammadiyah yang membangun kesadaran ekologis melalui rasionalitas normatif berbasis teks dan sains; NU yang menumbuhkan kesadaran ekologis melalui spiritualitas, tradisi, dan partisipasi masyarakat. Keduanya memberikan kontribusi besar terhadap perluasan diskursus Islam dan lingkungan di Indonesia dalam bentuk yang adaptif dengan keragaman sosial dan geografis masyarakat.

2. Implikasi terhadap Strategi Dakwah dan Pendidikan

Perbedaan pendekatan antara Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) dalam merespon isu lingkungan juga berimbas signifikan pada strategi dakwah dan sistem pendidikan yang mereka kembangkan. Keduanya memiliki jaringan kelembagaan yang luas dan berperan penting dalam pembentukan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pelestarian lingkungan, meskipun dengan corak dan metode yang berbeda.

Muhammadiyah, sebagai organisasi modernis, memiliki orientasi kelembagaan yang kuat dan terstruktur. Melalui jaringan amal usaha, khususnya di bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial, Muhammadiyah memanfaatkan institusi seperti sekolah, universitas, rumah sakit, dan Lembaga Pengembangan Cabang dan Ranting (LPCR) sebagai media dakwah dan transformasi nilai-nilai Islam yang progresif, termasuk isu-isu ekologis. Integrasi antara nilai-nilai keislaman dan ilmu pengetahuan menjadi ciri khas pendekatan Muhammadiyah (Sambas, 2019). Hal ini tampak dalam pengembangan kurikulum formal yang mulai memasukkan aspek ekoteologi Islam, pendidikan lingkungan berbasis Al-Qur'an dan hadis, serta penguatan etika ekologis Islam melalui pembelajaran interdisipliner.

Universitas Muhammadiyah, seperti UMY, UAD, dan UM Surakarta, misalnya, telah mengembangkan pusat studi lingkungan dan program pengabdian masyarakat berbasis pelestarian alam, termasuk konservasi sungai, program bank sampah, dan pelatihan eco-literacy untuk guru dan siswa. Dalam konteks ini, strategi dakwah Muhammadiyah menekankan pada pendekatan struktural-institusional yang berbasis pada rasionalitas, profesionalisme, dan keberlanjutan program (Yaya, 2021). Maka lahirnya kader-kader muda Muhammadiyah, tidak hanya memiliki kesadaran religius, tetapi juga memiliki kompetensi ekologis dan wawasan kebangsaan yang kuat.

Sebaliknya, NU mengembangkan pendekatan yang lebih tradisional, kultural, dan berbasis komunitas. NU memanfaatkan jaringan pesantren, majelis taklim, dan pengajian rutin di masyarakat sebagai sarana penyebaran pesan-pesan ekologis. Kelebihan pendekatan ini adalah kedekatannya dengan masyarakat akar rumput, terutama di pedesaan. Dalam konteks pesantren, para kiai memainkan peran penting dalam menyampaikan nilai-nilai Islam ekologis melalui ceramah, pengajian kitab kuning, dan teladan hidup yang menyatu dengan alam. Beberapa pesantren NU, seperti Pesantren Ekologi Ath-Thaariq di Garut dan Al-Imdad di Yogyakarta, telah menjadi pelopor dalam pengembangan pendidikan lingkungan berbasis Islam (Musthofa, 2020). Pesantren ini tidak hanya mengajarkan fiqh klasik, tetapi juga mengintegrasikan praktik pertanian organik, pengelolaan sampah, dan konservasi air sebagai bagian dari pendidikan karakter santri. Strategi ini menunjukkan bahwa NU tidak sekadar memberikan edukasi kognitif, tetapi juga mendorong transformasi perilaku ekologis melalui pendekatan sufistik dan keteladanan.

Majelis taklim dan forum pengajian yang dibimbing oleh kiai atau tokoh adat juga menjadi media efektif dalam menanamkan kesadaran ekologis secara informal dan personal. Pesan-pesan dakwah disampaikan dengan bahasa yang sederhana, berbasis kisah, dan selaras dengan budaya lokal. Hal ini membuat pendekatan NU lebih lentur, fleksibel, dan akomodatif terhadap konteks sosiokultural masyarakat Indonesia yang plural dan agraris. Benang merah implikasi ini dapat terlihat pada strategi dakwah Muhammadiyah yang berbasis institusi dan sains modern melahirkan kader-kader ekologis yang terlatih secara akademik dan teknokratik. Sementara strategi dakwah NU yang berbasis pesantren dan tradisi masyarakat menghasilkan perubahan kesadaran ekologis yang mengakar di level kultural dan spiritual. Kedua pendekatan ini meski berbeda corak saling mengisi dalam membangun gerakan Islam yang responsif terhadap krisis lingkungan di Indonesia.

3. Implikasi terhadap Aksi Sosial dan Kebijakan

Perbedaan pendekatan antara Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) dalam merespons krisis lingkungan menghasilkan dampak yang nyata dalam bentuk aksi sosial dan advokasi kebijakan. Kedua ormas ini mengembangkan metode dan jaringan aksi yang berbeda, namun saling melengkapi dalam mempromosikan kesadaran dan transformasi lingkungan hidup di Indonesia. Muhammadiyah, dengan struktur organisasi yang kuat dan berbasis amal usaha, mengedepankan pendekatan aksi yang terinstitusikan dan sistematis. Program andalan seperti EcoMasjid menjadi contoh konkret bagaimana Muhammadiyah mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan praktik ramah lingkungan (M. L. H. P. Muhammadiyah, 2022). Program ini memfasilitasi masjid-masjid untuk menjadi pusat konservasi energi, efisiensi air, dan pengelolaan sampah yang sesuai dengan prinsip Islam dan standar keberlanjutan modern.

Selain itu, Muhammadiyah melalui Majelis Lingkungan Hidup (MLH) melakukan advokasi kebijakan lingkungan berbasis keilmuan. Kerja sama dengan berbagai pihak pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan LSM memperlihatkan

bagaimana Muhammadiyah mendorong reformasi kebijakan lingkungan dari sisi struktural. Misalnya, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan Universitas Ahmad Dahlan telah mengembangkan pusat studi lingkungan serta mengadakan pelatihan dan pengabdian masyarakat untuk membentuk kader-kader ekologi Islam (Yaya, 2023). Implikasinya, pendekatan Muhammadiyah menghasilkan model kelembagaan Islam yang ramah lingkungan dan terstruktur. Meski program ini lebih terpusat pada perkotaan dan institusi formal, berkontribusi penting dalam penguatan kapasitas kelembagaan dan penyusunan kebijakan berbasis riset dan nilai keagamaan.

Berbeda dengan Muhammadiyah, NU lebih menekankan pendekatan berbasis komunitas dan kultural. Aksi lingkungan NU sering muncul dari inisiatif lokal yang dipandu oleh nilai-nilai keislaman tradisional dan kearifan lokal. Misalnya, pada Hari Santri 2023, berbagai cabang NU menyelenggarakan gerakan seperti “Hari Santri Menanam Pohon”, dengan menanam ribuan pohon di lingkungan pesantren dan desa-desa Nahdliyin, sebagai bentuk dakwah ekologis berbasis partisipasi warga (Suarana.com, 2023). NU melalui Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim (LPBI-NU) juga menginisiasi program penanaman mangrove dan bersih-bersih pantai yang tersebar di lebih dari 80 kilometer wilayah pesisir Indonesia. Kegiatan ini melibatkan santri, tokoh agama, serta masyarakat sekitar, dan dilakukan secara kolaboratif dalam suasana religius (Online, 2023). Strategi ini membentuk perubahan perilaku kolektif yang tidak selalu terlembagakan secara formal, tetapi sangat efektif dalam membangun kesadaran ekologis di tingkat akar rumput.

Selain itu, pengelolaan hutan adat oleh komunitas NU di beberapa wilayah, seperti Kalimantan dan Jawa Tengah, menunjukkan bagaimana fatwa dan musyawarah ulama lokal dapat dijadikan dasar moral dan spiritual dalam merawat alam. Fatwa-fatwa tersebut bersifat non-formal tetapi memiliki legitimasi kuat di kalangan warga NU, dan memperkuat posisi agama sebagai sumber motivasi etika lingkungan (Ichwan & Rais, 2020). Muhammadiyah, dengan pendekatan teknokratik dan kelembagaan, cenderung memiliki akses lebih besar terhadap pengaruh kebijakan formal dan edukasi sistematis. NU, di sisi lain, memiliki kekuatan besar dalam menciptakan transformasi sosial berbasis budaya dan partisipasi masyarakat lokal. Sinergi kedua pendekatan ini dapat membentuk ekosistem advokasi lingkungan yang utuh: rasional-ilmiah sekaligus spiritual-komunal.

4. Implikasi terhadap Kebijakan Publik dan Advokasi

Muhammadiyah dengan karakteristik modernis dan rasionalnya, aktif dalam forum-forum kebijakan publik, terutama dalam memberikan masukan terhadap regulasi dan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkungan. Melalui Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi Publik (LBHAP) Pimpinan Pusat Muhammadiyah, organisasi ini secara kritis menanggapi kebijakan pemerintah yang dianggap tidak sesuai dengan prinsip keadilan ekologis. Sebagai contoh, pada tahun 2023, LBHAP Muhammadiyah menyatakan bahwa pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta

Kerja menjadi undang-undang adalah inkonstitusional dan tidak memenuhi syarat formal pengesahan undang-undang (Afandi, 2023).

Selain itu, dalam Mukhtamar ke-48 Muhammadiyah, organisasi ini menegaskan pentingnya memperkuat advokasi kebijakan publik dan memanfaatkan potensi ahli hukum di lingkungan persyarikatan untuk membangun kesadaran dan perilaku ramah lingkungan. Muhammadiyah juga mengembangkan konsep dan model gerakan lingkungan hidup yang berpraksis dakwah, serta meningkatkan kapasitas kelembagaan dalam mengembangkan kesadaran dan kepedulian terhadap lingkungan (P. P. Muhammadiyah, 2022).

Sebaliknya, NU lebih memilih jalur advokasi moral melalui fatwa sosial dan pendekatan kultural yang bertujuan membangun kesadaran kolektif. Melalui forum Bahtsul Masail, NU membahas isu-isu lingkungan dan menghasilkan fatwa yang mengikat secara moral bagi warga Nahdliyin. Sebagai contoh, pada tahun 2019, dalam Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar NU, NU menetapkan bahwa pencemaran lingkungan yang menimbulkan kerusakan hukumnya haram dan termasuk perbuatan kriminal (Qulyubi, Syarief, Fuaidi, & Baidhowi, 2019). Pendekatan ini juga terlihat dalam praktik di tingkat lokal. Misalnya, PCNU Jember mengeluarkan fatwa lingkungan yang berpengaruh terhadap kebijakan publik di daerah tersebut (Mun'im et al, 2025). Keberhasilan ini tidak hanya bertumpu pada argumentasi fikih dalam teks fatwa, tetapi juga pada modal simbolik dan sosial yang dimiliki oleh ulama NU, serta hubungan politik PCNU Jember.

KESIMPULAN

Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama merupakan dua ormas besar Islam yang aktif dalam merespon setiap polemik sosial keagamaan di Indonesia. Perbedaan mendasar pada aspek pendekatan istinbath hukum kedua ormas ini terletak pada sisi pengimplementasian taklid. Terkhusus pada aspek ekologi, Muhammadiyah dan NU memiliki kesamaan secara tujuan kemaslahatan, namun berbedq dari segi responsifitas aktivitas tambang. Muhammadiyah mengedepankan aspek regulasi dan legalitas yang terkesan modernistik, sedangkan NU bersifat fleksibilitas dan berdasar pada pendekatan kulturisasi dan tradisionalistik. Secara gerakan politik, Muhammadiyah bergerak secara reformis, sedangkan NU bergerak secara tradisionalis. Perbedaan pendekatan ini berimplikasi pada aspek wacana keagamaan, strategi dakwah dan pendidikan, aksi sosial dan kebijakan, serta advokasi dan *public policy*.

Implikasi penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan pengembangan penelitian dan kajian pemikiran secara komprehensif kedepannya terkait diskursus perbedaan pandangan berbasis organisasi yang tidak menutup kemungkinan kedepannya akan semakin berkembang. Selain itu, orgmas besar Islam di Indonesia diharapkan dapat menjadi perbedaan yang bersifat kolaboratif sehingga mampu menutupi setiap problematika yang ada di masyarakat, baik berkaitan pada aspek sosial maupun keagamaan, serta bisa menjadi garda terdepan dalam memberikan solusi terhadap permasalahan yang berkaitan kebijakan, dalam artian sebagai *social control*.

DAFTAR PUSTAKA

- Absoellah, O. S. (2020). *Dari Ekologi Manusia ke Ekologi Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Afandi. (2023). Perppu Ciptaker Disahkan Jadi Undang-Undang, Ketua Riset LBHAP PP Muhammadiyah Sebut Inkonstitusional. Retrieved from %0AHome Berita%0APerppu Ciptaker Disahkan Jadi Undang-Undang, Ketua Riset LBHAP PP Muhammadiyah Sebut Inkonstitusional
- Al-Bujairimi, S. bin M. (n.d.). *Hasyiah al-Bujairimi 'ala al-Manhaj* (Vol. 2). Bulaq: Musthafa al-Babi al-Halabi.
- Al-Kuwait, W. al-A. wa al-S. al-I. bi. (n.d.). *al-Mausu'at al-Fiqhiyyah* (Vol 25). Kuwait: Wuzarat al-Awqaf al-Kuwaitiyyah.
- Al-Shiddieqy, T. M. H. (n.d.). *Pengantar Siyasah Syar'iyah*. Yogyakarta: Madah.
- Al-Zuhaili, W. (2001). *Ushul al-Fiqhi al-Islami* (Vol. 1). Damaskus: Daar al-Fikr.
- Anam, C. (2010). *Pertumbuhan dan Perkembangan NU* (Cet. III). Surabaya: PT Cipta Aksara Mulia.
- Arifin, M. (2016). *Muhammadiyah Potret yang Berubah*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.
- Bruinessen, M. Van. (1994). *NU, Tradisi, Relasi-Relasi Kuasa, Pencarian Warna Baru*. Yogyakarta: LKiS.
- Djamil, F. (1995). *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah* (Cet. I). Jakarta: Logos Publishing.
- Dzuhayatin, S. R. (2019). Islam, Ekologi, dan Keberlanjutan Hidup: Perspektif Muhammadiyah. *Jurnal Kontekstualitas*, 34(2), 120–135.
- Fanie, Z., & Sarbadila, A. (2000). *Sumber Konflik Masyarakat Muslim: Muhammadiyah-NU; Perspektif Keberterimaan Tahlil* (Cet. I). Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Febriansyah, A. H., & Nasuki, H. (2024). Respons Muhammadiyah dan Nadlatul Ulama Terhadap Petik Laut di Desa Brondong Lamongan Jawa Timur. *Inklusiva: Jurnal Studi Agama-Agama*, 2(1), 27–44.
- Fikriana, A., & Rezki, M. K. (2024). Etika politik dan kualifikasi calon legislatif dalam pemilu: Perspektif fiqh siyasah. *Aladalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 2(1), 235–248.
- Ghazali, A. M. (2002). *Argumen Islam untuk Lingkungan Hidup*. Jakarta: ICIP.
- Haidar, M. A. (1994). *Nahdhat al-Ulama dan Islam di Indonesia, Pendekatan Fikih dalam Politik*. Jakarta: Gramedia.
- Hawari, A. Y., Suwaryo, U., & Kartini, D. S. (2023). Perbandingan Peran Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah dalam Politik di Indonesia. *Jurnal Pemerintahan Dan Kebijakan (JPK)*, 5(1), 41–53. <https://doi.org/10.18196/jpk.v5i1.19187>
- Hidayat, H. (2011). *Lingkungan: Pengelolaan Hutan Masa Orde Baru dan Reformasi*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Hilal, F., & Palantei, P. P. (2021). Metode Penalaran Hukum Islam Dalam Hukum Merokok; Studi Komparasi Terhadap Metode Ijtihad Bahtsul Masail Nahdatul Ulama Dan Majelis Tarjih Muhammadiyah. *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, 2(1 SE-). <https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i1.14830>
- Ichwan, M. N., & Rais, A. I. M. (2020). *Fiqh Ekologi: Perspektif Nahdlatul Ulama dalam Konservasi Lingkungan*. Jakarta: LKiS.
- Khallaf, A. W. (1977). *al-Siyasat al-Syar'iyat*. al-Qahirah: Dar al-Anshar.
- Lourrinx, E. (2022). *Pendidikan Lingkungan Hidup*. Kudus: Yayasan Kita Menulis.

- Manzur, I. (1968). *Lisan al-Arab* (Vol. VI). Beirut: Dar al-Shadir.
- Muhammadiyah, M. L. H. P. (2022). *Pedoman EcoMasjid* (Ed. Revisi). Yogyakarta: MLH PP Muhammadiyah.
- Muhammadiyah, M. T. dan T. P. (2018). *Fikih Lingkungan Hidup*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.
- Muhammadiyah, P. P. (n.d.). *Himpunan Putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah* (Cet. III). Yogyakarta: Muhammadiyah.
- Muhammadiyah, P. P. (2022). *Tanfidz Keputusan Mukmatar Ke-48 Muhammadiyah Tahun 2022*. Yogyakarta: Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
- Mun'im, Z., Harahap, W. R., Putra, R., Santoso, B., & Viegri, M. (2025). 'Ulamā', Authority, and Political Relations: How the PCNU Jember Fatwā Influenced Public Policy on Gold Mining in Silo? *Journal of Islamic Law*, 6(1), 46–66. <https://doi.org/10.24260/jil.v6i1.3605>
- Musthofa, A. (2020). Pesantren dan Gerakan Ekologis: Studi Kasus Pesantren Ekologi Ath-Thaariq Garut. *Islamic Ecology Journal*, 4(1), 33–49.
- Nashir, H. (2010). *Muhammadiyah Gerakan Pembaruan*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.
- Noer, D. (1980). *Gerakan Modern Islam di Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
- Nursyahbani, I., Husen, F., Nurhamdani, A., & Kholik, J. A. (2025). KECENDERUNGAN PRODUK HUKUM ISLAM DI INDONESIA: KAJIAN PADA METODOLOGI LEMBAGA FATWA DI INDONESIA. *Al-Thiqah: Jurnal Ilmu Keislaman*, 8(1), 340–359.
- Online, N. (2023). 12 Ribu Mangrove Ditanam, 80 Kilometer Pantai Dibersihkan oleh LPBI-NU di Hari Santri 2023. Retrieved from <https://nu.or.id/nasional/12-ribu-mangrove-ditanam-80-kilometer-pantai-dibersihkan-oleh-lpbinu-di-hari-santri-2023-1q3SZ>
- PBNU, L. B. M. (2019). *Fikih Ekologi*. Jakarta: LBM-PBNU dan LKiS.
- Peacock, J. L. (2016). *Gerakan Muhammadiyah: Memurnikan Ajaran Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.
- Qulyubi, M., Syarief, S., Fuaidi, A. N., & Baidhowi, M. (2019). *No Titlea Hasil-Hasil Munas Alim Ulama dan KONbes NU 2019*. (M. Ma'afi & A. Kurniawan, Eds.). Jakarta Pusat: Lembaga Ta'lif wan Nasyar PBNU.
- Qurrotul'ain, D., & Soleh, A. K. (2024). Krisis Lingkungan (Human-Ekologi) dalam Pandangan Filsafat Mulla Shadra. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 5(6), 250–258.
- Ratnasari, A., & Dwisusanto, Y. B. (2024). Interaksi Manusia dan Lingkungan dalam Kajian Filosofis. *MARKA (Media Arsitektur Dan Kota): Jurnal Ilmiah Penelitian*, 7(2), 195–208.
- Romli. (1999). *Muqaranah Mazahib fil Ushul* (Cet. I). Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Sakti, F. T. (2020). *Pengantar Ilmu Politik* (Cet. I). Bandung: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Sunan Gunung Djati.
- Sambas, N. (2019). Pendidikan Lingkungan dalam Perspektif Islam di Lembaga Pendidikan Muhammadiyah. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 16(2), 145–158.
- Sandiah, F. A. (2023). Risalah Islam Berkemajuan untuk Krisis Ekologi #1. Retrieved from <https://muhammadiyah.or.id/2023/08/risalah-islam-berkemajuan-untuk-krisis-ekologi/>
- Suaedy, A. (2015). NU dan Islam Ekologis: Respon terhadap Krisis Lingkungan di Indonesia. *Studia Islamika*, 22(1), 1–28.
- Suarana.com. (2023). PCNU Kabupaten Karawang Secara Simbolis Menanam 10.000

- Pohon di Pondok Pesantren Nurul Falah al-Huda. Retrieved from <https://www.suarana.com/2023/10/pcnu-kabupaten-karawang-secara-simbolis.html>
- Suryanullah, A. S., Rifai, A., & Darojah, F. S. (2025). Echoing Ecological Ideas as an Option in Teaching Islamic Education in Indonesia: Menggaungkan Gagasan Ekologis sebagai Opsi dalam Pengajaran Pendidikan Islam di Indonesia. *Jurnal Living Hadis*, 10(1), 43–63.
- Taimiyah, I. (n.d.). *al-Siyasah al-Syar'iyah fi Ishlah al-Ra'i wa al-Ri'ayah*. Mesir: Daar al-Kitab al-Arabiy.
- Wahdini, M., Jubba, H., & Kamsi, K. (2025). Ecological Legal Politics in Indonesia: Criticism of Muhammadiyah Jurisprudence in the Reformation Era. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 9(1), 454–520.
- Wahdini, M., Kamsi, K., & Jubba, H. (2024). Environmental Governance in Indonesia: Muhammadiyah's Role, State Intervention, and Legal Practice Dynamics. *Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran*, 24(1), 189–205.
- Widodo, D. (2021). *Ekologi dan Ilmu Lingkungan*. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Yahya, A. N. (2024). Melihat Respon NU dan Muhammadiyah Soal Konsesi Tambang. Retrieved from <https://nasional.kompas.com/read/2024/06/07/11443241/melihat-respons-nu-dan-muhammadiyah-soal-konsesi-tambang?page=all>
- Yaya, R. (2021). Green Campus dan Kontribusi Universitas Muhammadiyah terhadap Gerakan Lingkungan. *Prosiding Seminar Nasional Ekologi Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*.
- Yaya, R. (2023). Green Campus dan Kontribusi Universitas Muhammadiyah terhadap Gerakan Lingkungan. In *Prosiding Seminar Nasional Ekologi Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Zahro, A. (2004). *Tradisi Intelektual NU: Lajnah Bahtsul Masail 1926-1999* (Cet. I). Yogyakarta: LKiS.
- Zuhri, S., & Hasbullah, A. W. (1972). *Bapak dan Pendiri NU*. Jakarta: Yamunu.